DECISION: Jurnal Administrasi Publik
Volume 8, Nomor 2, September 2026
E-ISSN: 265-4939
P-ISSN: 2655-884X

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA EDUKASI MANGROVE BULAKSETRA DI DESA BABAKAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN

Daffa Putra Laksana[1], Mona Indrianie[2]

[1]**Administrasi Publik, Universiteas Pasundan**
daffaplaksana@gmail.com
[2]**Administrasi Publik, Universitas Pasundan**
monaindrianie@unpas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini memiliki latar belakang masalah untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dan indikator dari George C. Edward III. Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah (1) komunikasi, dimana pemerintah desa cukup baik dalam berkomunikasi namun belum optimal dalam konsistensi komunikasi sehingga masyarakat kurang memahami isi kebijakan, (2) sumber daya, pemerintah desa dan kelompok PPKP sudah memiliki staf yang berkompeten namun kurang koordinasi dan fasilitas yang tidak terpenuhi membuat pelaksanaan program kebijakan menjadi terbatas, (3) disposisi (sikap), pemerintah desa memiliki sikap antusias dalam program tersebut, namun belum optimal melakukan koordinasi antar sesama pelaksana kebijakan, (4) struktur organisasi memiliki SOP sebagai acuan utama dalam melaksanakan program kebijakan namun tahapan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing unit belum optimal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pendukung dan hambatan dalam melaksanakan kebijakan dalam pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra yang terdapat pada dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengembangan objek

DECISION
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PRODI ADM. PUBLIK FISIP UNPAS

PENDAHULUAN

1. Konteks Penelitian

Kepariwisataan telah dicantumkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang berisikan "bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dimasyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional".

Dari peraturan tersebut berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan dengan kata lain pengembangan kawasan objek wisata perlu melibatkan berbagai *stake holder* atau kepentingan yang mendasar melalui organisasi perangkat desa untuk mendukung sektor pariwisata dan menunjang keterlibatan peran masyarakat didalamnya. Hal ini sangat penting karena masyarakatnya memiliki banyak informasi serta pengetahuan mengenai keadaan suatu objek di daerahnya.

Kepariwisataan telah dicantumkan didalam UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang berisikan "bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dimasyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional".

Berdasarkan Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2022 Bab I Pasal I ayat 13 tentang ketentuan umum desa wisata berisikan bahwa desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung aktivitas, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat. Oleh karena itu terbitlah kebijakan Pemerintah Desa untuk mengembangkan potensi objek wisata.

Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran adalah salah satu desa yang bisa dikatakan mempunyai potensi wisata guna dalam pengembangan suatu objek wisata yang independent serta berkelanjutan. Pada Desa Babakan Kecamatan Pangandaran di dalamnya terdapat desa wisata nelayan, lalu ada juga kuliner dan produksi pangan sebagai ciri khas di desa tersebut seperti pengolahan ikan asin dan lan sebagainya, dan juga ada kawasan wisata edukasi pohon mangrove atau disebut dengan bulak setra dalam kegunaannya terhadap suatu lingkungan desa tersebut, lalu ada Pelabuhan pendaratan ikan yang selalu dijadikan tempat bersantai bagi wisatawan lokal untuk menikmati suasana kegiatan masyarakat disana, dan masih banyak beberapa usaha kecil menengah mengenai produk lokal yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya

Maka dari itu, peran daripada Pemerintah Desa diharapkan dapat menentukan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan direncanakan. Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran memiliki kebijakan dalam pengembangan objek wisata di daerah tersebut. Peneliti telah melakukan survei dan juga mencari data-data akurat melalui media cetak dan media elektronik mengenai permasalahan di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran dan masih ada beberapa yang tidak optimal

DECISION
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PUBLIK FISIP UNPAS

dalam pengembangan objek wisata edukasi mangrove di desa tersebut.

Menurut Iskandar (2012) bahwa kebijakan itu sendiri dapat diartikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, kegiatan, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para aktor kebijakan, sebagai tahapan untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi.

Desa Babakan itu sendiri, masih belum maksimal dalam implementasi pengembangan objek wisatanya dan sangat disayangkan potensi objek wisata di daerah kawasan tersebut belum optimal dalam pengembangannya mengenai objek wisata, sedangkan pada hakikatnya pengembangan suatu objek wisata di daerah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran akan sangat memberikan sebuah hasil yang positif untuk seluruh pihak yang ada di dalamnya dalam menunjang kesejahteraan dan kepentingan di desa tersebut. Salah satunya objek wisata yang harus dikembangkan untuk mendongkrak potensi objek wisata di desa Babakan tersebut adalah wisata edukasi mangrove Bulaksetra. Serta kurangnya koordinasi dari masyarakat dan pemerintah desa mengenenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sehingga belum sepenuhnya maksimal dalam prosesnya. Pada akhinya banyak wisatawan yang masih asing dengan Desa wisata Babakan. Tentunya hal ini menjadikan sebuah hambatan mengenai pengembangan objek wisata pada kawasan tersbeut. Kepentingan inilah yang berkenaan dengan pengembangan objek wisata yang harus direalisasikan secara sistematis, terstruktur, terencana, terpadu, dan tanggung jawab dengan baik melalui kebijakan oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian konteks penelitian yang peneliti paparkan diatas, maka peneliti menarik rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Kebijakan dari Pemerintah Desa dalam pengembangan objek wisata di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana hambatan dan upaya terhap implementasi Kebijakan dari Pemerintah Desa dalam pengembangan objek wisata di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk memahami implementsi kebijakan pengembangan objek wisataadi Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran
2. Untuk Memahami hambatan dan upaya terhadap implementasi Kebijakan dari Pemerintah Desa dalam pengembangan objek wisata di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan tidak hanya mempunyai kegunaan yang bersifat teoritis saja, akan tetapi mempunyai kegunaan yang bersifat praktis dan akademis. Kegunaan yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan

DECISION
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PRODI ADM.PUBLIK FISIP UNPAS

pengalaman serta memperlebar wawasan dalam menerapkan teori yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Publik terutama yang berkaitan dengan Impelementasi.

2. Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan alternatif konsep berfikir atau pertimbangan bagi para pihak pengambil keputusan terkhususnya dalam memecahkan suatu permasalahan yang serupa dan dapat menjadikan bahan referensi bagi penelitian akademis kedepannya.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan juga Penelitian ini dilakukan selama 19 hari terhitung dari tanggal 11 Juli, 2022 sampai dengan 29 Juli, 2022.

DECISION
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PRODI ADM.PUBLIK FISIP UNPAS

Metode Pengumpulan Sampel

Metode pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Argumen peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pertama, implementasi kebijakan sangat membutuhkan masukan serta saran yang dapat diwawancara. Kedua, implementasi kebijakan pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ini membutuhkan pengumpulan sebuah data dan mencari informasi dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu melalui observasi, wawancara, dan hasil informasi yang relevan terhadap penelitian.

Fokus Penelitian

Implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini dinilai dari aspek - aspek implementasi kebijakan berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut **George C. Edward III** yang terdiri dari:

1. Komunikasi. Indikator ini sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik. Maksudnya adalah efektivitas implementasi sangat tergantung dengan adanya pemahaman para pembuat keputusan mengenai apa yang harus dikerjakan dan hal ini tentunya harus ada komunikasi yang baik.
2. Sumber daya. Sangat mempengaruhi efektivitas daripada implementasi kebijakan publik. Kekurangan dan tidaknya sumber daya baik personal, kewenangan, keuangan, dan peralatan akan menyulitkan pada sebuah implementasi.
3. Disposisi. Dapat dikatakan dengan sikap yang berkaitan dengan kepatuhan para implementor untuk mampu melaksanakan kebijakan publik. Tanpa adanya dari kemampuan pelasana kebijakan, maka implementasi kebijakan publik akan tidak efektif dan efisien.
4. Struktur organisasi. Yang menyangkut di dalamnya mengenai kerjasama, koordinasi, dan prosedur atau tata kerja sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan para informan penelitian.
2. Data Sekunder Data sekunder dalam penelitian diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yaitu gambaran umum mengenai objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra dan pelaksanaan implementasi pengembangan pariwisata edukasi mangrove Bulaksetra, foto-foto dokumentasi, dan data-data terkait informasi wisata edukasi manrove Bulaksetra, buku dan peraturan terkait kepariwisataan, Tupoksi kantor desa Babakan kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, serta data jumlah fasilitas dan berbagai alat pendukung didalamnya.

Informan Penelitian

Informan atau seseorang yang akan diwawancarai dengan memiliki informasi tentang objek dalam penelitian. Informan juga merupakan objek penting dalam sebuah penelitian yang akan diteliti, karena informan dianggap mengetahui latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai pengimplementasian kebijakan dalam pengembangan objek wisata di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten pangandaran. Peneliti disini menggunakan metode *purpose sampling* yaitu pengambilan data secara dipilih dengan pertimbangan berdasarkan kriteria sebagai perwakilan di dalamnya. Dengan demikian peneliti beranggapan bahwa dalam menggunakan *Purposive Sampling* dikarenakan agar disaat pengumpulan data-data yang berkaitan dengan penelitian dengan menggunakan wawancara dari narasumber yang sudah dianggap mengetahui informasi secara utuh. Sumber data dari penelitian ini didapatkan oleh informan yang ada pada lingkungan Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu (Sugiyono, 2013). Selain itu, dalam menganalisis data yang diperoleh di lapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

DECISION
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PRODI ADM.PUBLIK FISIP UNPAS

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti adalah Desa Babakan Pangandaran, Jl. Raya Banjar-Pangandaran No.100, Babakan, Kec. Pangandaran, Kab.Pangandaran, Jawa Barat 46396.

Objek penelitian ini dimaksudkan untuk melihat suatu kebijakan publik dalam pengembangan objek wisata di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran untuk mewujudkan sebagai pangandaran menjadi wisata

kelas dunia. Dengan demikian kebijakan yang dikeluarkan mengenai pengembangan objek wisata di desa tersebut dapat menunjang masyarakat untuk berinovasi pada sektor pariwisata dalam kesejahteraan masyarakat. Pada objek penelitian ini juga peneliti dapat mengetahui dan memahami kebijakan publik yang diimplementasikan oleh Pemerintah Desa untuk mengembangkan objek wisata yang ada di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terutama pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra.

Desa ini diapit oleh dua sungai sebagai batas wilayah desa tersebut, sungai Ciputrapinggan dan sungai Cikidang untuk batas wilayah barat berbatasan dengan Desa Pangandaran, yang dimana batasan sungai ini mempunnyai potensi wisata air seperti bersampan. Desa ini memiliki pantai tepatnya adalah pantai Timur Pangandaran dan pantai Bulaksetra yang biasa dikenal oleh masyarakat sekitar yaitu dengan sebutan Basisir Cileutik yang terdapat muara Cileutik yang biasa digunakan arena memancing, outbond atau berkemah dan muara Cikidang ada juga sebuah DAM peninggalan Belanda yang biasa digunakan sampai saat ini untuk irigasi pertanian selain itu juga digunakan untuk jalur *body rafting*. Desa Babakan memiliki luas wilayah 604 hektare teridiri atas beberapa dusun atau kampung yang rata-rata mempunyai 3 RW diantaranya adalah Desa Bojongsari, Desa Karanggede, Desa Kalapatiga, Desa Kamurang, dan Desa Bojongkrekes. Desa Babakan secara keseluruhan memiliki lebih dari 10.000 jiwa yang bergantung kepada kantor Pemerintah Desa Babakan dalam memenuhi kebutuhan administrasi. seluruh masyarakat tersebut apabila memerlukan kebutuhan administrasi akan diurus oleh 16 orang perangkat desa, segala pelayanan masyarakat desa yang terdiri dari : pembuatan KTP, surat keterangan lahir, pembuatan kartu keluarga, pengurusan surat kematian, jaringan aspirasi rakyat, dll. Seluruh layanan tersebut termasuk roda pemerintahan yang akan disukeskan oleh 16 orang perangkat desa, perangkat desa tersebut antara lain : 1) Kepala Desa, 2) Sekretaris Desa, 3) Kasi Pemerintahan, 4) Kasi kesejahteraan, 5) Kasi Pelayanan, 6) Kaur Umum, 7) Kaur Perencanaan, 8) Kaur Keuangan, 9) Operator Komputer.

Penduduk di Desa Babakan mayoritas mata pencahariannya sebagai nelayan dan petani sehingga dari segi sektor ekonominya bergantung kepada mata pencaharian hasil laut dan hasil bumi. Sosial budaya yang selalu dijunjung oleh penduduk Desa Babakan adalah kebiasannya bergotong royong dalam hal kegiatan kemasyarakatan dan menjadikan desa ini menjadi sebuah contoh dalam rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang kuat.

DECISION
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PRODI ADM.PUBLIK FISIP UNPAS

PEMBAHASAN

Berdasarkan pembahasan Implementasi Kebijakan Dalam Pengembangan Objek Wisata Edukasi Mangrove Bulaksetra di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dengan melakukan wawancara mendalam kepada Pak Wahab Ruswandi selaku Kepala Seksi Pelayanan, dan Dede Iswara selaku Kepala urusan Perencanaan. Maka peneliti menyimpulkan berdasarkan teori yang sudah direncanakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori menurut George C. Edward III (Suparno, 2017: 33-34) Mengemukakan dimensi implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi (sikap), Struktur Organisasi. Adapun indikator yang berkaitan dalam dimensi teori George C. Edward III (Suparno,

2017: 33-34) yaitu :

1. Dimensi Komunikasi

Terkait komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa baik kepada kelompok yang telah dibentuknya maupun kepada masyarakat dilaksanakan dengan cara musyawarah dan juga dilakukannnya sosialisasi sehingga masyarakat secara umum dapat mengetahui informasi mengenai program mengenai pengimplementasian kebijakan terkait pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra. Akan tetapi tingkat konsistensi komunikasi yang dilakukan masih belum optimal sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program implementasi kebijakan tersebut.

Analisis SWOT yang didapatkan diantaranya yaitu, kekuatan (*Strengths*) yang dimiliki terkait dimensi komunikasi pada indikator transmisi yang baik, peneliti melakukan observasi lapangan dan wawancara secara langsung yang di mana pemerintah desa memberikan komunikasi dan sosialisasi serta membentuk sebuah kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir dari masyarakat pilihan yang kemudian dibuatkan SK untuk berkontribusi dalam sebuah program implementasi kebijakan mengenai pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra. Serta dalam dimensi komunikasi ini pada dasarnya pemerintah desa Babakan mengedepankan rundingan atau musyawah terkait program yang diimplementasikan.

Kelemahan (*Weaknesses*) yang didapati dari dimensi komunikasi dalam indikator konsistensi komunikasi ini terhadap pemerintah desa Babakan itu sendiri sudah memberikan sosialisasi akan tetapi sosialisasi yang diberikan masih kurang merata kepada warga masyarakat khususnya di Dusun Kamurang yang menjadi titik lokasi pengembangan objek wisata edukasi mangrove. Banyaknya masyarakat yang masih belum paham mengenai program yang dijalankan serta kemanfaatan mengenai tanaman mangrove yang dikembangkan untuk menjadi sebuah objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra.

Peluang (*Opportunities*) yang dimiliki terkait dimensi komunikasi pada indikator kejelasan komunikasi ini, pemerintah desa Babakan mampu meningkatkan sosialisasi mengenai program implementasi kebijakan pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra yang bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang dibuat oleh pemerintah desa Babakan itu sendiri maka besar kemungkinan program yang dijalankan oleh pemerintah desa Babakan akan memberikan sebuah pemahaman kepada warga masyarakat secara umum terkait pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra ini, yang nantinya implementasi kebijakan terkait program pengembangan objek wisata dapat terlaksana sebagai mestinya dan mencapai hasil yang telah direncanakan sebelumnya.

Ancaman (*Threats*) yang di dapati terkait dimensi komunikasi pada indikator konsistensi komunikasi, yaitu jika dari masyarakat masih banyak belum memahami isi kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah desa Babakan karena kurang konsistennya komunikasi yang dilakukan, maka ancaman yang dimiliki pemerintah desa Babakan sulitnya keikutsertaan yang dilakukan masyarakat dalam melakukan pengimplementasian kebijakan pengembangan objek wisata tersebut. Sehingga pemerintah desa Babakan harus terus memberikan pengarahan dan sosialisasi dengan kelompok yang dibentuknya mengenai implementasi

DECISION
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PRODI ADM.PUBLIK FISIP UNPAS

kebijakan pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra.

Maka dari itu peneliti dapat menarik kesimpulan, jadi pada dimensi komunikasi terkait program implementasi kebijakan, peneliti menyimpulkan bahwa mengenai pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra ini yang di mana komunikasi dengan masyarakat apalagi dengan kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir yang telah diberikan SK untuk berkolaborasi atau bekerjasama dalam mengembangkan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra yang berada di Desa Babakan Dusun Kamurang.

2. Dimensi Sumber Daya

Dari hasil observasi dan wawancara maka peneliti memberikan hasil informasi data pada dimensi sumber daya ini. Analisis SWOT yang didapatkan diantaranya kekuatan (*Strengths*) yang dimiliki pemerintah desa Babakan mengenai dimensi sumber daya pada indikator staff yang berkompetensi ini adalah pemerintah desa Babakan sudah mempunyai unit bagian yang membidangi program implementasi kebijakan terkait pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra. Kasi pelayanan, kaur perencanaan, serta masyarakat pilihan yang dibentuk menjadi sebuah kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir. Lalu juga pemerintah desa Babakan memiliki lahan yang strategis untuk pengembangan objek wisata yang menjadi sebuah program implementasi kebijakan serta setiap tahunnya selalu dilaksanakan Pendidikan dan pelatihan khusus terkait program itu sendiri.

Kelemahan (*Weaknesses*) terkait dimensi sumber daya pada indikator staff yang berkompetensi dan fasilitas yang dihadapi pemerintah desa Babakan yaitu masih belum optimalnya pihak internal dalam berkoordinasi terhadap program implementasi kebijakan yang dijalankannya. Serta anggaran yang masih terbatas sehingga dalam proses pembibitan hingga perawatan masih apa adanya, dan juga desa Babakan ini tidak memiliki website yang di mana jika hal tersebut ada maka akan lebih membantu pemerintah desa Babakan itu sendiri terkait program kebijakan yang dilaksanakan.

Peluang (*Opportunities*) yang dimiliki pemerintah desa Babakan terkait dimensi sumber daya pada indikator fasilitas adalah Desa Babakan mempunyai lahan yang strategis untuk dijadikan sebuah peluang dalam mengembangkan dan pengoptimalan yang dilakukan pemerintah desa serta kelompok yang dibentuk guna mencapai tujuan daripada program implementasi kebijakan pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra. Sehingga nantinya masyarakat desa Babakan dapat merasakan hasil dari program implementasi kebijakan. Dan juga jika desa Babakan telah memiliki website maka besar kemungkinan untuk mengundang berbagai *Stakeholder* untuk bekerja sama sehingga dapat membantu pelaksanaan atau implementasi program kebijakan pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra.

Ancaman (*Threats*) yang dihadapi terkait dimensi sumber daya pada indikator fasilitas yang ada pada pemerintah desa Babakan dengan menggunakan dan memaksimalkan fasilitas yang sebagian masih terbatas serta teknologi yang masih minim digunakan, jika hal ini masih saja belum terdapat perubahan yang dilakukan terkait fasilitas yang diberikan serta dilakukan oleh pemerintah desa serta kelompok yang telah dibentuk maka

DECISION
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PRODI ADM.PUBLIK FISIP UNPAS

terjadi ketertinggalan terhadap program kebijakan yang dilakukan pemerintah desa Babakan dengan desa-desa lain mengenai pengembangan objek wisata yang sudah memiliki fasilitas serta sumber daya yang mumpuni.

Maka peneliti dapat menyimpulkan terkait dimensi sumber daya peneliti menyimpulkan bahwa di dalam sumber daya di sini terdapat staff yang berkompetensi dalam menjalankan program yang dibuat oleh pemerintah desa Babakan didasari dengan Pendidikan dan pelatihan khusus, Akan tetapi ketidakselarasan dari Kaur Perencanaan yang tidak menjelaskan bahwasannya Kaur perencaan juga ikut terlibat dalam membidangi program kebijakan pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra sedangkan menurut Kasi Pelayanan yang di mana Kaur Perencanaan ini menjadi peranan dalam membidangi program kebijakan tersbut yang berkaitan dengan penataan lokasi. Lalu terkait dengan fasilitas dalam dimensi sumber daya ini pemerintah desa Babakan sarana yang belum dimiliki oleh Desa Babakan yaitu berupa fasilitas yang dimiliki oleh desa masih ada beberapa yang belum optimal seperti dari anggaran atau pembiayaan serta website yang belum ada dan masih tahap perencanaan dikarenakan sumber daya pegawai yang masih kurang berkompetensi dalam teknologi informasi digital.

DECISION
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FISIP UNPAS

3. Dimensi Disposisi

Dari hasil observasi dan wawancara maka peneliti memberikan hasil informasi data pada dimensi Disposisi (sikap) ini, Analisis SWOT yang didapatkan diantaranya kekuatan (*Strengths*) pada dimensi disposisi (sikap) pada indikator efek disposisi yang dimiliki pemerintah desa Babakan maupun kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir memiliki sebuah sikap yang positif dan sangat mendukung sekali dengan adanya program implementasi kebijakan pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra guna nantinya meningkatkan sektor kesejahteraan masyarakat. Dan dalam proses pengimplementasiannya baik dari pemerintah desa maupun kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir selalu melakukan pengecekan dan pengawasan langsung ke lokasi yang menjadi program pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra.

Kelemahan (*Weaknesses*) yang didapati terkait dimensi disposisi (sikap) pada indikator efek disposisi oleh pemerintah desa Babakan adalah sikap yang dilakukan pemerintah desa terkait memberikan sebuah informasi mengenai isi kebijakan pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra kepada masyarakat. Lalu sikap dari setiap unit bagian baik dari pemerintah desa maupun kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir belum optimal untuk berkoordinasi antar sesama pihak pelaksana kebijakan. Serta pemerintah desa Babakan masih belum mengambil sikap terhadap sampah bawaan yang tersangkut di bibir sungai dan pohon mangrove yang nantinya lambat laun akan merusak ekosistem lingkungan, sehingga masih belum adanya kesatuan sikap atau tindakan yang dilakukan secara bersama mengenai sampah, apalagi tempat khusus untuk membuang dan mengumpulkan sampah.

Peluang (*Opportunities*) yang mampu didapati terkait dimensi disposisi (sikap) pada indikator efek disposisi baik dari pemerintah desa Babakan maupun kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir jika dilakukannya koordinasi yang lebih optimal serta memiliki sikap atau keseragaman tindakan dalam hal kecil

hingga ke hal yang besar terkait program implementasi kebijakan pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra ini, maka hal-hal yang menjadi peluang yaitu dapat teratasinya penumpukkan sampah, sehingga kemudahan dalam implementasi kebijakan terkait program pengembangan objek wisata edukasi mangrove. Sehingga nantinya dengan adanya kesatuan tindakan atau sikap yang dimiliki setiap unit bagiannya dapat memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan program yang sedang berlangsung.

Ancaman (*Threats*) yang dihadapi terkait disposisi (sikap) pada indikator efek disposisi, baik dari pemerintah desa Babakan maupun kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir, adanya ketidaksatuan tindakan antar unit bagian pelaksana kebijakan yang menjadikan sebuah ancaman dalam program implementasi kebijakan mengenai pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra. Maka dari itu pemerintah desa Babakan dengan kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir jika hal ini terus masih berlanjut akan terjadi ketersendatan mengenai pelaksanaan program kebijakan yang sedang berlangsung.

Maka peneliti dapat menarik kesimpulan terkait dimensi disposisi (sikap) setelah peneliti melakukan observasi langsung di lapangan dan wawancara terdapat efek disposisi yang di mana sikap dari pemerintah desa Babakan memiliki dampak atau menimbulkan sebuah hambatan dari pihak internal yang berkaitan dengan program implementasi kebijakan pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra. Efek disposisi ini menjadi salah satu hambatan di dalam implementasi kebijakan mengenai pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra. Sehingga pada dimensi Disposisi ini terlihat bahwa pihak pemerintah desa Babakan memiliki kekurangan yang menjadi hambatan serta kesulitan bagi kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir yang telah di bentuk dan dibuatkan SK oleh pemerintah desa Babakan. Sehingga hambatan seperti ini memberikan sebuah efek atau dampak bagi masyarakat atau kelompok itu sendiri untuk berbuat secara inisiatif dan sukarela dalam menjalankan proses dari program kebijakan yang sedang berlangsung.

4. Dimensi Struktur Organisasi

Dari hasil observasi dan wawancara maka peneliti memberikan hasil informasi data pada dimensi Struktur Organisasi ini, Analisis SWOT yang didapatkan diantaranya kekuatan (*Strengths*) yang dimiliki dalam dimensi struktur organisasi pada indikator standar operasional baku dari pemerintah desa Babakan, telah dibuatnya SOP atau standar aturan dalam melakukan program kerja yang telah disepakati dan ditetapkan oleh pemerintah desa Babakan maupun Kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir. Sehingga SOP yang ditetapkan ini menjadi sebuah aturan dasar kerja mengenai program yang dijalankan terkait implementasi kebijakan pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra, serta penahapan atau fragmentasi kewenangan atau tanggung jawab setiap unit bagian pelaksana kebijakan sesuai dan searah dengan SOP yang ditetapkan bersama. Sehingga pengimplementasian terkait program kebijakan pengembangan objek wisata edukasi mangrove dapat menjadi terarah dan koordinir dengan baik.

Kelemahan (*Weaknesses*) yang dimiliki pada dimensi struktur organisasi pada indikator fragmentasi atau penahapan ini, ketidakseragaman tindakan serta kewewnangan dan

DECISION
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PRODI ADM.PUBLIK FISIP UNPAS

tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah desa Babakan maupun kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir masih belum optimal sehingga masih sulit pada setiap unit bagiannya kurang maksimal.

Peluang (*Opportunities*) yang didapatkan pada dimensi struktur organisasi ini adalah pemerintah desa Babakan maupun kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir memiliki SOP dan penahapan kewenangan mengenai tanggung jawab dari setiap unit bagiannya. Jika pemerintah desa Babakan dan kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir memiliki kesatuan tindakan maka dari itu peluang yang dimiliki untuk melaksanakan atau mengimplementasikan sebuah program terkait pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra dapat terwujud dengan optimal.

Ancaman (*Threats*) yang dihadapi pada dimensi struktur organisasi pada indikator fragmentasi atau penahapan ini di mana pemerintah desa Babakan beserta kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir, masih ada beberapa yang lalai dalam setiap unit bagiannya sehingga belum optimal mengenai kewenangan dan tanggung jawab yang harus dilakukan guna mengimplementasikan kebijakan terkait pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra. Jika hal ini masih muncul maka dipastikan kewenangan dan rasa tanggung jawab yang dimiliki dari setiap unit bagiannya akan menghilang dan menjadikan implementasi kebijakan yang diprogramkan akan terus lambat.

Maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan terkait dimensi struktur organisasi setelah peneliti melakukan observasi langsung di lapangan dan wawancara, struktur organisasi pada pemerintah desa Babakan dan kelompok PPKP memiliki SOP atau biasa dikatakan standar aturan kerja dan juga penahapan atau fragmentasi terhadap pembagian kewenangan atau tanggung jawab antar unit bagian pelaksana kebijakan. SOP yang ditetapkan pemerintah desa Babakan sudah berjalan namun masih belum optimal dalam pelaksanaannya. mengenai pembagian kewenangan atau tanggung jawab antar unit-unit bagian dalam program yang diimplementasikan sudah cukup baik dan sudah memiliki tanggung jawab antar unit bagiannya. Sehingga dalam hal pembagian tugasnya masing-masing dari pelaksana kebijakan. Sehingga struktur organisasi yang dimiliki pemerintah desa dan dikemudian dibuatkan lalu dikembangan dengan membentuknya suatu kelompok dari masyarakat, sehingga struktur yang dibuat serta fragmentasi tanggung jawab dapat dimiliki setiap unit bagian berdasarkan SOP yang ditetapkan terkait program implementasi kebijakan pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra.

DECISION
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PRODI ADM.PUBLIK FISIP UNPAS

Pembahasan mengenai Hambatan dan Upaya implementasi Kebijakan dari Pemerintah Desa dalam pengembangan objek wisata di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Salah satu tugas pokok, dan fungsi seorang aparatur sipil negara adalah memberikan sebuah pelayanan kepada publik atau masyarakat pada instansi pemerintahan atau organisasi publik. Akan tetapi seperti yang sudah dijelaskan di atas terdapat beberapa hambatan yang ditemukan pada pelaksanaan program implementasi kebijakan mengenai pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, yang diantaranya adalah sebagai berikut

:

1. Dimensi Komunikasi

Pada dimensi komunikasi terdapat hambatan yang ada pada indikator konsistensi komunikasi ini terhadap pemerintah desa Babakan mengenai sosialiasi yang diberikan masih kurang merata dan tertunda kepada warga masyarakat khususnya di Dusun Kamurang yang menjadi titik lokasi pengembangan objek wisata edukasi mangrove. Banyaknya masyarakat yang masih belum paham mengenai program yang dijalankan serta kemanfaatan mengenai tanaman mangrove yang dikembangkan untuk menjadi sebuah objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra. Upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan pada dimensi komunikasi tersebut adalah dari kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir yang salah satu anggotanya melakukan sebuah inisiatif sendiri untuk memberikan bentuk komunikasi dengan cara bersosialisasi memberitahukan program implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa Babakan dalam pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra. Sehingga masyarakat sedikit demi sedikit paham mengenai tujuan dan manfaat daripada mangrove yang dikembangkan untuk menjadi salah satu
objek wisata edukasi.

2. Dimensi Sumber daya

Pada dimensi sumber daya ini memiliki hambatan pada indikator staff yang berkompetensi dan fasilitas yang dihadapi pemerintah desa Babakan yaitu masih belum optimalnya pihak internal dalam berkoordinasi terhadap program implementasi kebijakan yang dijalankannya. Serta anggaran yang masih terbatas sehingga dalam proses pembibitan hingga perawatan masih apa adanya, dan juga desa Babakan ini tidak memiliki website yang di mana jika hal tersebut ada maka akan lebih membantu pemerintah desa Babakan itu sendiri terkait program kebijakan yang dilaksanakan.

Upaya dalam menangani hambatan pada dimensi sumber daya tersebut adalah pemerintah desa Babakan sendiri selalu mengupayakan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada atau yang sedang direncanakan seperti pembuatan website yang nantinya akan membantu setiap program yang dijalankan termasuk program pengimplementasian kebijakan mengenai pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra, dan juga pemerintah desa Babakan menyisihkan anggaran setiap tahunnya dan hasil daripada swadaya pemerintah desa, kelompok, dan masyarakat untuk pemeliharaan dan pengembangan objek wisata edukasi mangrove secara bertahap. Lalu pemerintah desa Babakan juga akan saling berkoordinasi agar tidak terjadi hambatan-hambatan yang besar.

3. Dimensi Disposisi

Pada dimensi disposisi (sikap) terdapat hambatan yang ditemui pada indikator efek disposisi oleh pemerintah desa Babakan adalah sikap dari setiap unit bagian baik dari pemerintah desa maupun kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir belum optimal untuk berkoordinasi antar sesama pihak pelaksana kebijakan. Serta pemerintah desa Babakan masih belum mengambil sikap terhadap sampah bawaan yang tersangkut di bibir sungai dan pohon mangrove yang nantinya lambat laun akan merusak ekosistem lingkungan, sehingga masih belum adanya kesatuan sikap atau tindakan yang dilakukan secara bersama mengenai sampah, apalagi tempat khusus untuk

DECISION
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PRODI ADM.PUBLIK FISIP UNPAS

membuang dan mengumpulkan sampah.

Upaya dalam menangani hambatan pada dimensi sumber disposisi (sikap) tersebut adalah pihak kelompok masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah desa Babakan yaitu Kelompok Penggerak dan Pengelola Kawasan Pesisir (KPPKP) memiliki anggota yang mempuni pada bidangnya sehingga hambatan yang disadari mereka langsung bertanggung jawab dengan langsung turun ke lapangan, akan tetapi pihak kelompok dan pemerintah desa Babakan telah berkoordinasi dengan *Stakeholder* yaitu dengan cabang dinas kehutanan wilayah VII Ciamis, sehingga dengan adanya kerja sama ini membantu kelancaran daripada progam implementasi kebijakan yang sedang berlangsung.

4. Dimensi Struktur Organisasi

Yang didapati oleh peneliti setelah melakukan observasi lapangan dan wawancara terdapat hambatan pada dimensi struktur organisasi dalam indikator fragmentasi atau penahapan ini, ketidakseragaman tindakan serta kewewnangan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah desa Babakan maupun kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir masih belum optimal sehingga masih sulit pada setiap unit bagiannya kurang maksimal.

Upaya dalam menangani hambatan pada dimensi struktur organisasi tersebut adalah kesadaran Kasi Pelayanan dan individu dari kelompok PPKP selalu mengajak dan mengupayakan serta memaksimalkan kepada anggota yang lainnya atau unit bagian dalam program implementasi kebijakan pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra sehingga program yang dibuat ini akan berjalan dengan baik dan selalu dilakukan pengecekan serta pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa Babakan.

DECISION
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PRODI ADM.PUBLIK FISIP UNPAS

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan juga uraian pembahasan mengenai implementasi kebijakan dalam pengembangan objek wisata edukasi mangrove di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, sehingga kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan dalam pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dapat terukur menggunakan teori dan indikator George C. Edward III melalui empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur organisasi.
   1) Dimensi komunikasi, berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait observasi, wawancara, dan bukti dokumentasi bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Babakan yaitu sosialisasi sehingga masyarakat secara umum dapat mengetahui informasi mengenai implementasi kebijakan pengembangan objek wisata. Akan tetapi tingkat konsistensi komunikasi yang dilakukan masih belum optimal sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program implementasi kebijakan tersebut.
   2) Dimensi sumber daya, terdapat staff yang berkompetensi dalam menjalankan program yang dibuat oleh pemerintah desa Babakan didasari dengan Pendidikan dan pelatihan khusus. Akan tetapi kurangnya

koordinasi antara kaur perencanaan dan kasi pelayanan bahwasannya Kaur perencaan juga ikut terlibat dalam membidangi program implementasi kebijakan. Dan juga fasilitas yang dimiliki masih belum optimal seperti dari anggaran atau pembiayaan serta website yang belum ada dan masih tahap perencanaan dikarenakan sumber daya pegawai yang masih kurang berkompetensi dalam teknologi informasi digital.

3) Dimensi disposisi (sikap), Sikap pemerintah desa Babakan dan kelompok PPKP sangat antusias dan mendukung serta mengambil sikap secara cepat dan tepat. Akan tetapi terlihat bahwa pihak pemerintah desa Babakan memiliki kekurangan yang menjadi hambatan serta kesulitan bagi kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir yang telah di bentuk dan dibuatkan SK oleh pemerintah desa Babakan.
4) Dimensi struktur organisasi, dari pemerintah desa Babakan, telah dibuatnya SOP atau standar aturan dalam melakukan program kerja yang telah disepakati dan ditetapkan oleh pemerintah desa Babakan maupun Kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir. Namun ketidakseragaman tindakan serta kewewnangan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah desa Babakan maupun kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir masih belum optimal sehingga masih sulit pada setiap unit bagiannya kurang maksimal.

2. Hambatan serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Babakan maupun kelompok PPKP terkait implementasi kebijakan dalam pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
   1) Hambatan dan upaya pada dimensi komunikasi, komunikasi ini terhadap pemerintah desa Babakan mengenai sosialiasi yang diberikan masih kurang merata dan tertunda kepada masyarakat. Banyaknya masyarakat yang masih belum paham mengenai program yang dijalankan. Upaya yang dilakukan kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir yang salah satu anggotanya melakukan sebuah inisiatif sendiri untuk memberikan bentuk komunikasi dengan cara bersosialisasi memberitahukan program implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa Babakan dalam pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra.
   2) Hambatan dan upaya pada dimensi sumber daya, yang di mana masih belum optimalnya pihak internal dalam berkoordinasi terhadap program implementasi kebijakan yang dijalankannya. Serta anggaran yang masih terbatas sehingga dalam proses pembibitan hingga perawatan masih apa adanya, dan juga desa Babakan ini tidak memiliki website. Upaya yang dilakukan pemerintah desa Babakan sendiri selalu mengupayakan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada atau yang sedang direncanakan seperti pembuatan website, dan juga pemerintah desa Babakan menyisihkan anggaran setiap

DECISION
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PRODI ADM.PUBLIK FISIP UNPAS

tahunnya dan hasil daripada swadaya pemerintah desa, kelompok, dan masyarakat untuk pemeliharaan dan pengembangan objek wisata edukasi mangrove secara bertahap.

3) Hambatan dan upaya pada dimensi disposisi (sikap), yaitu sikap dari setiap unit bagian baik dari pemerintah desa maupun kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir belum optimal untuk berkoordinasi antar sesama pihak pelaksana kebijakan. Serta pemerintah desa Babakan masih belum mengambil sikap terhadap sampah bawaan yang tersangkut di bibir sungai dan pohon mangrove. Upaya yang dilakukan yaitu Kelompok Penggerak dan Pengelola Kawasan Pesisir (KPPKP) memiliki anggota yang mempuni pada bidangnya, akan tetapi pihak kelompok dan pemerintah desa Babakan telah berkoordinasi dengan *Stakeholder* yaitu dengan cabang dinas kehutanan wilayah VII Ciamis.
4) Hambatan dan upaya dimensi struktur organisasi, yaitu ketidakseragaman tindakan serta kewewnangan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah desa Babakan maupun kelompok penggerak dan pengelola kawasan pesisir masih belum optimal sehingga masih sulit pada setiap unit bagiannya kurang maksimal. Lalu upaya kesadaran Kasi Pelayanan dan individu dari kelompok PPKP selalu mengajak dan mengupayakan serta memaksimalkan kepada anggota yang lainnya atau unit bagian dalam program implementasi kebijakan dan selalu dilakukan pengecekan serta pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa Babakan.

SARAN

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap implementasi kebijakan dalam pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran disarankan untuk ditindaklanjuti dengan menggunkan pendekatan yang lainnya. Membangun adanya penelitian Kembali secara terperinci terkait studi implementasi kebijakan untuk mewujudkan buah pikiran secara teoritis dalam pengembangan objek wisata terutama objek wisata edukasi sehingga nantinya dapat memberikan hasil yang lebih lengkap dan menemukan sebuah konseptual yang sistematis dan fleksibel dan pada akhirnya bermanfaat bagi pengembangan studi ilmu administrasi publik.

Guna meningkatkan pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, peneliti memberikan saran di antaranya yaitu :

1. Saran pada dimensi Komunikasi yaitu diberikannya penyuluhan dan pertemuan yang rutin untuk bisa mensosialisasikan program implementasi kebijakan sehingga masyarakat akan sepenuhnya paham dan memberikan kontribusi guna menghasilkan pengembangan objek wisata edukasi mangrove.
2. Saran pada dimensi Sumber Daya yaitu kuatkan Kembali koordinasi dan komunikasi dari pihak internal lalu disegerakan untuk membuat website untuk

DECISION
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PRODI ADMINISTRASI PUBLIK FISIP UNPAS

lebih mempromosikan potensi wisata dan mengundang *Stakeholder* untuk berkolaborasi, dan lebih dimanfaatkan kembali hasil daripada sisa anggaran serta hasil swadaya bersama, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat termanfaatkan dengan baik dan efisien.

3. Saran pada dimensi Disposisi (sikap) yaitu setiap individunya harus bertindak secara sadar dan penuh tanggung jawab sehingga kedepannya program Implementasi kebijakan pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra dapat berjalan dan terlaksana dengan maksimal oleh para implementor.
4. Saran pada dimensi Struktur Organisasi yaitu setiap unit bagiannya harus lebih aktif kemnbali dalam memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang telah dimiliki pada setiap unit bagian pihak implementor. Dan juga harus sering dilakukannya penahapan dari setiap unit bagiannya untuk melakukan pengecekan dan pengawasan yang secara berkala sehingga nantinya implementasi kebijakan pengembangan objek wisata edukasi mangrove ini dapat terlaksana lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Maksudi, Beddy Iriawan. (2018). *Dasar-Dasar Administrasi Publik.* Depok: Rajawali Pers

Sellang, Kamaruddin. (2016). *Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI).

Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pasolong, Harbani. (2019). *Teori administrasi publik*. Bandung: alfabeta.

Handoyo, Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.

Pramono, Joko. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Surakarta: Percetakan Kurnia.

Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana. (2016). *Teori dan analisis kebijakan publik.* Bandung: Alfabeta.

Sulistyadi, Yohanes, Fauziah Eddyono, Bernard Hasibun. (2017). *Pariwisata berkelanjutan: pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.

Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan dalam Praktek.* Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.

Sugiyono. (2013). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Alamsyah, Kamal. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi.* Bandung: Media Citra Mandiri Press.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gava Media.

Sedarmayanti, Gumelar S. Sastrayuda, Lia Afriza. (2018). *Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

Silvia, Dewi. (2019). Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu*

DECISION
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PRODI ADM.PUBLIK FISIP UNPAS

Administrasi Negara, Volume 6 Nomor 3. 4-6.

Qodriyatun, Sri Nurhayati. (2018). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Karimunjawa. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Volume 9 Nomor 2.* 224.

Mapahena, Mex Iver, Agustinus B. Pati, Deysi Tampongangoy. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Selat Lembeh Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung. *Agri-SosioEkonomi Unsirat, Volume 17 Nomor 2*. 402.

Dokumen

UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2022 Bab I Pasal I ayat 13 Tentang Ketentuan umum desa wisata